TINJAUAN PERKEMBANGAN EKONOMI KABUPATEN BULELENG 2019

DINAS STATISTIK KABUPATEN BULELENG

LAMBANG KOTA SINGARAJA

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS STATISTIK

Ir. I KETUT NERDA

KEPALA DINAS STATISTIK KABUPATEN BULELENG

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS STATISTIK

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Buleleng, diperlukan perencanaan, pengendalian, serta evaluasi yang matang. Kegiatan tersebut tidak akan berhasil tanpa didukung oleh data dan informasi yang tepat dan terpercaya.

Penyusunan publikasi Tinjauan Perkembangan Ekonomi Kabupaten Buleleng 2019 ini, untuk mengetahui capaian pembangunan ekomoni di Kabupaten Buleleng dan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang keadaan perekonomian seperti struktur dan tingkat pertumbuhan ekonomi, serta peranan masing-masing kegiatan ekonomi.

Disadari sepenuhnya bahwa penyajian publikasi ini masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan guna kesempurnaan publikasi ini di masa yang akan datang.

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

Akhinya, kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi hingga terwujudnya publikasi ini disampaikan terima kasih. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat.

Singaraja, September 2019
Kepala Dinas Statistik
Kabupaten Buleleng

Ir. I Ketut Nerda
NIP. 19600606 198901 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....I

LAMBANG KOTA SINGARAJA III

FOTO KEPALA DINAS STATISTIK KABUPATEN BULELENG V

KATA PENGANTAR VII

DAFTAR ISI IX

DAFTAR TABEL XI

DAFTAR GAMBAR XII

LAMPIRAN XIII

BAB I PENDAHULUAN..... 3

1.1 LATAR BELAKANG 3
1.2 TUJUAN PENULISAN 6
1.3 SUMBER DATA 6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN..... 7

BAB II RUANG LINGKUP METODE ANALISIS..... 10

2.1. PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)..... 11
2.2. RUANG LINGKUP KATEGORI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)..... 14
2.2.1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 14
2.2.2 Pertambangan dan Penggalian..... 14
2.2.3. Industri Pengolahan 15
2.2.4. Pengadaan Listrik dan Gas 16
2.2.5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang 16
2.2.6. Konstruksi..... 17
2.2.7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 18
2.2.8. Transportasi dan Pergudangan..... 18
2.2.9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 19

2.2.10. Informasi dan Komunikasi 20
2.2.11 Jasa Keuangan dan Asuransi 20
2.2.12. Real Estat 21
2.2.13. Jasa Perusahaan 21
2.2.14. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 22
2.2.15 Jasa Pendidikan 22
2.2.16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 23
2.2.17 Jasa Lainnya 24
2.3 ANALISIS LOCATION QUOTIENT 24
2.4 ANALISIS SHIFT SHARE 25

BAB III PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN BULELENG **29**

BAB IV LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI BULELENG **35**

BAB V STRUKTUR EKONOMI KABUPATEN BULELENG **46**

BAB VI PDRB PERKAPITA EKONOMI BULELENG **54**

LAMPIRAN-LAMPIRAN **60**

SINGA AMBARA RAJA
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. PDRB Kabupaten Buleleng Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2017-2018 (dalam miliar rupiah) 33

Tabel 4. 1. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buleleng Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha,2017–2018 (Persen) 41

Tabel 6. 1. Nilai Produk Domestik Regional Bruto 2015-2018 56

Tabel 6. 2. Nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Buleleng, 2015-2018 57

SINGA AMBARA RAJA
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Persentase PDRB Kabupaten Buleleng Terhadap PDRB Provinsi Bali Tahun 2018 (Persen) 30
Gambar 3. 2. PDRB Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2018 32

Gambar 4. 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng, ... 38
Gambar 4. 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali, 2013– 2018 (Persen) 42

Gambar 5. 1. Kontribusi Sektor Primer, Sekunder, Tersier 48
Gambar 5. 2. Lima Kontributor Terbesar 49
Gambar 5. 3. Kontribusi Kategori Pertanian di Kabupaten Buleleng 50

Gambar 6. 1. Perbandingan Nilai PDRB/kapita Atas Dasar Harga Berlaku Antara Kabupaten Buleleng Dengan Provinsi Bali Tahun 2015 - 2018 57
Gambar 6. 2. Perbandingan Nilai PDRB/kapita Atas Dasar Harga Konstan Antara Kabupaten Buleleng Dengan Provinsi Bali Tahun 2015 - 2018 58

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

LAMPIRAN

Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buleleng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (Miliar Rupiah) 60
Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buleleng Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (Miliar Rupiah) 62
Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buleleng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (Persen) 63
Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buleleng Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen), 2014–2018 64
Lampiran 5. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buleleng Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2014-2018..... 65
Lampiran 6. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buleleng Menurut Lapangan Usaha, 2014-2018 66
Lampiran 7. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buleleng Menurut Lapangan Usaha, 2014-2018 (Persen) 67
Lampiran 8. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha,2018 (Miliar Rupiah) 68
Lampiran 9. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha,2018 (Miliar Rupiah) 69

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

Lampiran 10. Laju Inflasi / Deflasi Kab. Buleleng 2016 - 2018 70
Lampiran 11. Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng dan Propinsi Bali 1993 – 2018 71

SINGA AMBARA RAJA
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

BAB I
PENDAHULUAN

SINGA AMBARA RAJA
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

SINGA AMBARA RAJA

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS STATISTIK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tolak ukur pembangunan nasional adalah pembangunan ekonomi. Sektor ekonomi selalu menjadi fokus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti yang tertuang dalam program Nawa Cita, pemerintah juga menempatkan pembangunan ekonomi sebagai salah satu fokus program pemerintah selama lima tahun kedepan yaitu ingin mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Tidak hanya pada level nasional saja, masing-masing pemerintah daerah pun tetap berupaya pembangunan ekonomi di daerahnya berjalan sesuai harapan. Hal ini tidak lain bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pemerataan distribusi pendapatan masyarakatnya.

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

Selaras dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng memiliki misi dalam upaya pembangunan ekonomi yaitu memantapkan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah. Dengan landasan

pengembangan ekonomi kerakyatan, diharapkan pembangunan ekonomi Kabupaten Buleleng tidak hanya tumbuh, namun hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Sudah tentu hal ini akan memperkuat pondasi pembangunan ekonomi Kabupaten Buleleng di segala bidang.

Perlu disadari bahwa rencana pembangunan di Kabupaten Buleleng tidak hanya dilakukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga harus mampu menciptakan pemerataan pendapatan masyarakatnya. Oleh karena itu perlu upaya-upaya pembangunan yang bertujuan untuk lebih menyejahterakan masyarakatnya sehingga akan memperkuat pondasi pembangunan Kabupaten Buleleng di segala bidang.

Upaya pembangunan perekonomian khususnya dalam meningkatkan pendapatan Kabupaten Buleleng dan kesejahteraan pada umumnya telah menunjukkan adanya peningkatan. Namun demikian masih ditemukan kehidupan ekonomi dan kesenjangan sosial yang menuntut usaha yang sungguh-sungguh untuk mengatasinya agar tidak berkelanjutan dan berkembang ke arah yang menimbulkan kecemburuan sosial. Perluasan dan penataan dunia usaha masih perlu ditingkatkan dalam rangka menggairahkan kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan pendapatan

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

masyarakat secara lebih merata melalui mantapnya iklim ekonomi yang didukung melalui pembinaan peningkatan usaha informal seperti usaha rumahtangga, usaha kecil dan menengah. Tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya, harapan pemerintah khususnya Kabupaten Buleleng yang ingin dicapai yaitu mampu meningkatkan taraf hidup dan menciptakan pendapatan masyarakat yang lebih merata, serta memperluas kesempatan kerja.

Pembangunan ekonomi yang berhasil dan dinamis merupakan tujuan setiap negara di dunia termasuk Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi diperlukan perencanaan pembangunan yang baik dan mantap berdasarkan akurasi data yang akuntabel sehingga mampu mencapai hasil-hasil pembangunan sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah di tetapkan. Dalam perencanaan pembangunan selalu dibutuhkan data yang tepat dan terpercaya sebagai sarana penunjang yang melandasi perencanaan pembangunan dan juga sebagai landasan evaluasi kebijakan terdahulu yang sudah dilaksanakan agar kedepannya dapat dicapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam melihat pembangunan ekonomi khususnya di Kabupaten Buleleng, perlu diketahui bagaimana

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

perkembangan ekonomi yang dilihat dari struktur, tingkat, dan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng melalui angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang disajikan secara berkala dari tahun ke tahun dan dirinci menurut lapangan usaha/ sektoral. Data PDRB ini akan disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan tahun 2010.

1.2 Tujuan Penulisan

Penerbitan publikasi Tinjauan Ekonomi Kabupaten Buleleng 2018 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Buleleng meliputi nilai tambah sektoral, struktur perekonomian, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita di Kabupaten Buleleng dari tahun 2012-2018. Di dalamnya juga diselipkan data penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor sehingga dapat diketahui sektor mana yang seharusnya dikembangkan di Kabupaten Buleleng sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya.

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

1.3 Sumber Data

Sumber data yang diperoleh hingga terbitnya publikasi ini adalah data yang berasal dari BPS Kabupaten Buleleng.

1.4 Sistematika Penulisan.

Publikasi ini dibagi menjadi empat bab, yaitu :

Bab I : Pendahuluan, menguraikan gambaran umum, maksud dan tujuan, sumber data dan sistematika penulisan.

Bab II : Ruang Lingkup dan Metode Analisis

Bab III : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Buleleng

Bab IV : Laju Pertumbuhan Ekonomi Buleleng

Bab V : Struktur Ekonomi Kabupaten Buleleng

Bab VI : PDRB Perkapita Ekonomi Kabupaten Buleleng

SINGA AMBARA RAJA
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

SINGA AMBARA RAJA

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS STATISTIK

BAB II
RUANG LINGKUP METODE ANALISIS

SINGA AMBARA RAJA
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

SINGA AMBARA RAJA

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS STATISTIK

BAB II
RUANG LINGKUP METODE ANALISIS

2.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat diartikan sebagai nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

Teknik perhitungan PDRB ada dua yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.

4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB) per satu orang penduduk.
5. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010.

Adapun manfaat perubahan tahun dasar PDRB antara lain :

1. Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
2. Meningkatkan kualitas data PDRB;
3. Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB secara berkala

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

1. Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil;
2. Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
3. Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun;
4. Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 2008;
5. Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) dan Indeks harga produsen (*Producers Price Index* /PPI);
6. Tersedianya kerangka kerja Sertifikat Uji Tipe (SUT) yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut.

Sementara implementasi adanya perubahan tahun dasar PDRB dari tahun 2000 menjadi tahun 2010, terjadi

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

perubahan klasifikasi yang digunakan oleh BPS yaitu dari 9 lapangan usaha menjadi 17 kategori.

2.2. Ruang Lingkup Kategori Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2.2.1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup segala pengusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Pengusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan penangkapan ikan di laut. Kategori ini juga emncakup jasa penunjang masing-masing kegiatan ekonomi tersebut.

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

2.2.2 Pertambangan dan Penggalian

Seluruh jenis komoditi yang dicakup dalam Kategori Pertambangan dan Penggalian, dikelompokkan dalam empat subkategori, yaitu: pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan

penggalian lainnya. Di Kabupaten Buleleng hanya terdapat penggalian lainnya saja. Kegiatan yang mencakup penggalian lainnya yaitu penggalian dan pengambilan segala jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada pada permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, dan komoditi penggalian selain tersebut di atas. Termasuk dalam subkategori ini adalah komoditi garam hasil penggalian.

2.2.3. Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori

industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

2.2.4. Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori ini mencakup kegiatan pengadaan tenaga listrik, gas alam dan buatan, uap panas, air panas, udara dingin dan produksi es dan sejenisnya melalui jaringan, saluran, atau pipa infrastruktur permanen. Dimensi jaringan/infrastruktur tidak dapat ditentukan dengan pasti, termasuk kegiatan endistribusian listrik, gas, uap panas dan air panas serta pendinginan udara dan air untuk tujuan produksi es. Produksi es untuk kebutuhan makanan/minuman dan tujuan non makanan. Kategori ini juga mencakup penpgoperasian mesin dan gas yang menghasilkan, mengontrol dan menyalurkan tenaga listrik atau gas. Juga mencakup pengadaan uap panas dan AC.

2.2.5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan berbagai

bentuk limbah/sampah, seperti limbah/sampah padat atau bukan baik rumah tangga ataupun industri, yang dapat mencemari lingkungan. Hasil dari proses pengelolaan limbah sampah atau kotoran ini dibuang atau menjadi input dalam proses produksi lainnya. Kegiatan pengadaan air termasuk kategori ini, karena kegiatan ini sering kali dilakukan dalam hubungannya dengan atau oleh unit yang terlibat dalam pengelolaan limbah/kotoran.

2.2.6. Konstruksi

Kategori Konstruksi adalah kegiatan usaha di bidang konstruksi umum dan konstruksi khusus pekerjaan gedung dan bangunan sipil, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Kegiatan konstruksi mencakup pekerjaan baru, perbaikan, penambahan dan perubahan, pendirian prafabrikasi bangunan atau struktur di lokasi proyek dan juga konstruksi yang bersifat sementara. Kegiatan konstruksi dilakukan baik oleh kontraktor umum, yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain, maupun oleh kontraktor khusus, yaitu unit usaha atau individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri.

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

2.2.7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

2.2.8. Transportasi dan Pergudangan

Kategori ini mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan. Kategori Transportasi dan Pergudangan terdiri atas: angkutan rel; angkutan darat; angkutan laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan; angkutan udara; pergudangan dan jasa penunjang angkutan, pos dan kurir. Kegiatan pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti: terminal, pelabuhan, pergudangan, dan lain-lain.

2.2.9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan sangat bervariasi. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja dan sejenisnya. Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau fasilitas akomodasi dan fasilitas makanan dan minuman, atau fasilitas akomodasi, makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran. Sementara penyediaan makan minum mencakup kegiatan pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran "*self service*" atau restoran "*take away*", baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang dimaksud penyediaan

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan.

2.2.10. Informasi dan Komunikasi

Kategori ini mencakup produksi dan distribusi informasi dan produk kebudayaan, persediaan alat untuk mengirimkan atau mendistribusikan produk-produk ini dan juga data atau kegiatan komunikasi, informasi, teknologi informasi dan pengolahan data serta kegiatan jasa informasi lainnya. Kategori terdiri dari beberapa industri yaitu Penerbitan, Produksi Gambar Bergerak, Video, Perekaman Suara dan Penerbitan Musik, Penyiaran dan Pemograman (Radio dan Televisi), Telekomunikasi, Pemograman, Konsultasi Komputer dan Teknologi Informasi.

2.2.11 Jasa Keuangan dan Asuransi

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan, asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang asset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.

2.2.12. Real Estat

Kategori ini meliputi kegiatan persewaan, agen dan atau perantara dalam penjualan atau pembelian real estat serta penyediaan jasa real estat lainnya bisa dilakukan atas milik sendiri atau milik orang lainyang dilakukan atas dasar balas jasa kontrak. Kategori ini juga mencakup kegiatan pembangunan gedung, pemeliharaan atau penyewaan bangunan. Real estat adalah property berupa tanah dan bangunan.

2.2.13. Jasa Perusahaan

Kategori Jasa Perusahaan merupakan gabungan dari 2 (dua) kategori, yakni kategori M dan kategori N. Kategori M mencakup kegiatan profesional, ilmu pengetahuan dan teknik yang membutuhkan tingkat pelatihan yang tinggi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan khusus yang tersedia untuk pengguna. Kegiatan yang termasuk kategori M antara lain: jasa hukum dan akuntansi, jasa arsitektur dan teknik sipil, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, periklanan dan penelitian pasar, serta jasa professional, ilmiah dan teknis lainnya. Kategori N mencakup berbagai kegiatan yang mendukung operasional usaha secara umum. Kegiatan yang termasuk kategori N antara lain: jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

hak opsi, jasa ketenagakerjaan, jasa agen perjalanan, penyelenggaraan tur dan jasa reservasi lainnya, jasa keamanan dan penyelidikan, jasa untuk gedung dan pertamanan, jasa administrasi kantor, serta jasa penunjang kantor dan jasa penunjang usaha lainnya.

2.2.14. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan. Kategori ini juga mencakup perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan peraturan perundang-undangan, kegiatan legislative, perpajakan, pertahanan Negara, keamanan dan keselamatan Negara, pelayanan imigrasi, hubungan luar negeri dan administrasi program pemerintah, serta jaminan sosial wajib.

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

2.2.15 Jasa Pendidikan

Kategori ini mencakup kegiatan pendidikan pada berbagai tingkatan dan untuk berbagai pekerjaan, baik secara lisan atau tertulis seperti halnya dengan berbagai cara komunikasi. Kategori ini juga mencakup pendidikan negeri dan swasta juga mencakup pengajaran yang terutama

mengenai kegiatan olahraga, hiburan dan penunjang pendidikan. Pendidikan dapat disediakan dalam ruangan, melalui penyiaran radio dan televisi, internet dan surat menyurat. Tingkat pendidikan dikelompokan seperti kegiatan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan lain, mencakup juga jasa penunjang pendidikan dan pendidikan anak usia dini.

2.2.16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya, dimulai dari pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga profesional terlatih di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain sampai kegiatan perawatan di rumah yang melibatkan tingkatan kegiatan pelayanan kesehatan sampai kegiatan sosial yang tidak melibatkan tenaga kesehatan profesional. Kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup: Jasa Rumah Sakit; Jasa Klinik; Jasa Rumah Sakit Lainnya; Praktik Dokter; Jasa Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Paramedis; Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional; Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan; Jasa Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (*Medical Evacuation*); Jasa Kesehatan Hewan; Jasa Kegiatan Sosial.

2.2.17 Jasa Lainnya

Kategori Jasa Lainnya meliputi: Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; Jasa Reparasi Komputer Dan Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga; Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan Yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan; Jasa Swasta Lainnya termasuk Kegiatan Badan Internasional, seperti PBB dan perwakilan PBB, Badan Regional, IMF, OECD, dan lain-lain.

2.3 Analisis Location Quotient

Selain struktur ekonomi, untuk melihat potensi unggulan di suatu wilayah dapat pula digunakan metode analisis LQ (*Location Quotient*). Pada umumnya analisis LQ untuk dapat menentukan sektor basis dan non basis. Sektor basis adalah sektor yang memiliki potensi besar dalam menentukan pembangunan menyeluruh di daerah, sedangkan sektor nonbasis merupakan sektor penunjang dalam pembangunan menyeluruh tersebut (Tarigan, 2005). Nilai yang diperoleh dari analisis LQ mengindikasikan sebagai berikut:

1. Jika LQ > 1, disebut sektor basis, yakni sektor yang tingkat spesialisasinya lebih tinggi daripada tingkat

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

propinsi, atau dapat dikatakan daerah tersebut memiliki potensi ekspor dalam kegiatan tertentu.

2. Jika LQ < 1, disebut sektor non-basis, yakni sektor yang tingkat spesialisasinya lebih rendah daripada tingkat wilayah di atasnya atau dengan kata lain daerah tersebut memiliki kecenderungan impor.
3. jika LQ = 1, tingkat spesialisasi wilayah perencanaan sama dengan tingkat wilayah di atasnya, atau dapat dikatakan bahwa daerah yang bersangkutan telah mencukupi kebutuhannya dengan kegiatan tertentu.

2.4 Analisis Shift Share

Analisis *Shift-share* juga merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk mengidentifikasi keunggulan, mengetahui perubahan dan pergeseran sektor atau industri pada perekonomian regional maupun lokal. Analisis *Shift-share* menggambarkan kinerja sektor-sektor di suatu wilayah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Bila suatu daerah memperoleh kemajuan sesuai dengan kedudukannya dalam perekonomian nasional, maka akan dapat ditemukan adanya shift (pergeseran) hasil pembangunan perekonomian daerah. Selain itu, laju pertumbuhan sektor-sektor di suatu wilayah akan dibandingkan dengan laju pertumbuhan perekonomian nasional beserta sektor-sektornya. Kemudian

dilakukan analisis terhadap penyimpangan yang terjadi sebagai hasil dari perbandingan tersebut. Bila penyimpangan itu positif, hal itu disebut keunggulan kompetitif dari suatu sektor dalam wilayah tersebut (Soepono,1993:44)

SINGA AMBARA RAJA
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

BAB III
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN BULELENG

SINGA AMBARA RAJA
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

SINGA AMBARA RAJA

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS STATISTIK

BAB III
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN BULELENG

Dalam rangka melaksanakan misi pembangunan ekonomi Kabupaten Buleleng yaitu memantapkan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada produk unggulan daerah, maka pemerintah daerah Kabupaten Buleleng mengikutsertakan masyarakat dalam upaya pengembangan pembangunan ekonomi di wilayahnya. Hal ini ditujukan agar pembangunan ekonomi tidak hanya dilakukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi juga dilakukan untuk membantu pemerataan pendapatan masyarakat dan hasil-hasilnya.

Kabupaten Buleleng memiliki luas hampir seperempat bagian dari luas wilayah Provinsi Bali. Dengan luas wilayah yang paling luas diantara seluruh Kabupaten/Kota se Bali, maka dapat dipastikan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Buleleng juga melimpah. Hal ini menjadi faktor penting dalam mendukung perekonomian Kabupaten Buleleng selain pembangunan infrastruktur yang terus dibenahi. Tercatat PDRB Kabupaten Buleleng Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2018 sebesar 33.098,33

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

milyar rupiah. Angka ini cukup membanggakan mengingat PDRB yang terbentuk pada tahun 2017 mencapai 30.463,41 Milyar rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 2.634,92 Milyar rupiah. Dengan total nilai yang telah dicapai pada tahun 2018, ternyata Kabupaten Buleleng mampu menyumbangkan 14,20 persen dari total PDRB yang terbentuk di Provinsi Bali.

Gambar 3. 1. Persentase PDRB Kabupaten Buleleng Terhadap PDRB Provinsi Bali Tahun 2018 (Persen)

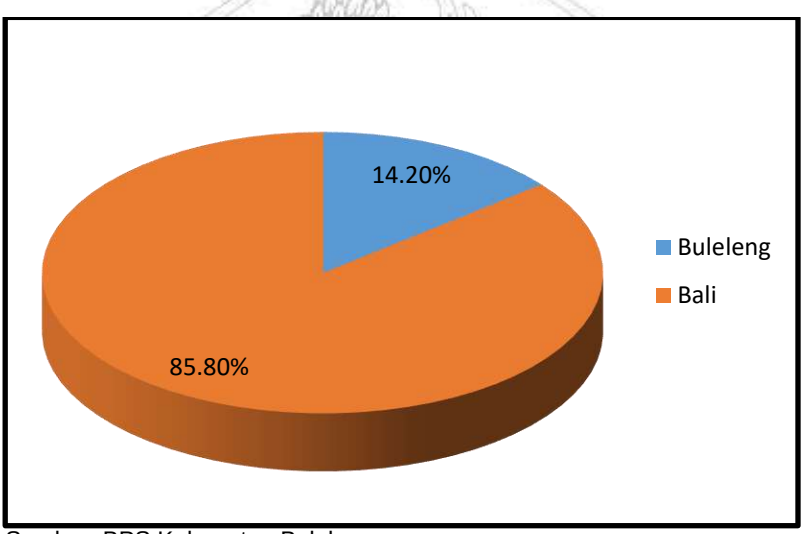

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng.

Kendala jarak yang cukup jauh dari Ibukota Provinsi, ternyata tidak menyurutkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Buleleng. Dibandingkan dengan sembilan Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Bali, nilai PDRB Kabupaten Buleleng berada pada posisi ketiga. PDRB

Kabupaten Buleleng memang berada di bawah nilai PDRB Kabupaten Badung dan PDRB Kota Denpasar yang masing-masing tercatat sebesar 57.443,84 milyar rupiah dan 51.440,63 milyar rupiah. Namun peningkatan nilai PDRB di Kabupaten Buleleng ternyata mampu melebihi peningkatan nilai PDRB Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah lebih dekat dengan Ibukota Provinsi yaitu Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Gianyar. Tercatat peningkatan nilai PDRB Kabupaten Buleleng sebesar 2.634,92 milyar rupiah rupiah, sementara Kabupaten Tabanan sebesar 1.797,64 milyar rupiah dan Gianyar sebesar 2.221,58 milyar rupiah.

Upaya Kabupaten Buleleng dalam pembangunan ekonomi diantara sembilan Kabupaten / Kota di Provinsi Bali, dirasa sangat positif mengingat Kabupaten Buleleng banyak melakukan gerakan-gerakan yang mengangkat ekonomi masyarakat seperti berbagai gelaran festival yang mampu mendorong UMKM dalam meningkatkan produksi. Selain itu geliat perekonomian Kabupaten Buleleng yang semakin membaik juga telah tampak setelah adanya wacana pendirian bandar udara di wilayah Kabupaten Buleleng serta pembangunan jalan baru pada ruas sukasada mengwi untuk mempercepat akses transportasi dari denpasar ke singaraja atau sebaliknya.

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

Gambar 3. 2. PDRB Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2018

(milyar rupiah)

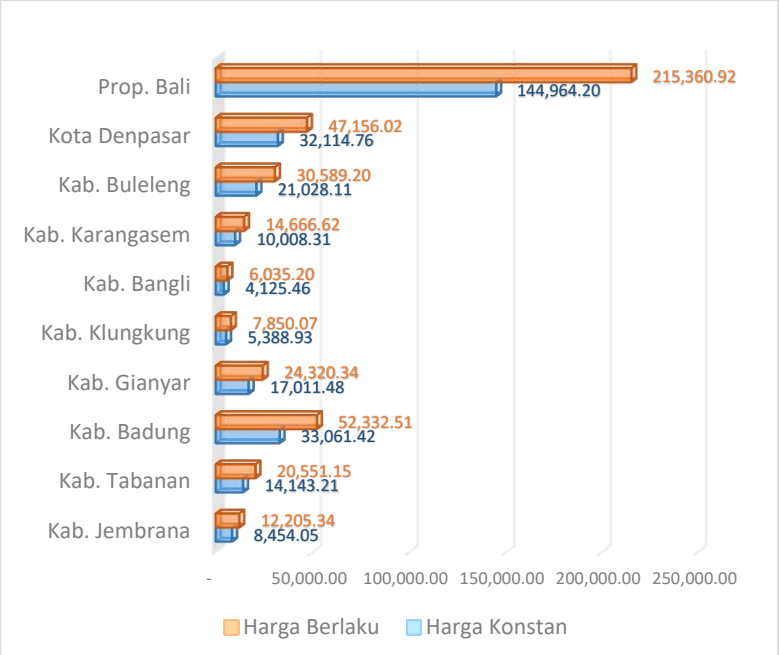

Sumber : BPS Provinsi Bali

Sementara potret perekonomian atas dasar harga konstan , PDRB Kabupaten Buleleng tahun 2018 sebesar 22.206,96 milyar rupiah. Nilai ini juga mengalami peningkatan sebesar 5,62 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai angka 21.028 milyar rupiah. Ini merupakan hal yang baik dalam upaya pembangunan ekonomi, mengingat ekonomi di Kabupaten Buleleng masih tumbuh positif pada tahun 2018

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

Tabel 3. 1. PDRB Kabupaten Buleleng Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan Tahun 2017-2018 (dalam miliar rupiah)

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan	
	2017*)	2018**)	2017*)	2018**)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.687,85	7.093,88	4.304,84	4.455,26
2. Pertambangan dan Penggalian	334.93	336,92	231,75	218,82
3. Industri Pengolahan	1791,56	1.965,49	1.198,47	1.262,18
4. Pengadaan Listrik dan Gas	50,90	57,05	28,53	30,65
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	41,61	44,27	32,76	33,63
6. Konstruksi	2.536,54	2.850,61	1.793,00	1.931,94
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.465,57	3.844,87	2.476,12	2.689,89
8. Transportasi dan Pergudangan	358,72	389,22	269,81	286,78
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.625,86	6.168,79	3.409,27	3.664,93
10. Informasi dan Komunikasi	1.621,45	1.777,50	1.454,96	1.560,86
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.285,57	1.351,30	904,91	923,01
12. Real Estat	1.373,67	1.454,22	1.094,04	1.137,87
13. Jasa Perusahaan	203,74	220,71	142,58	150,89
Produk Domestik Regional Bruto	30.463,41	33.098,33	21.025,50	22.206,96

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

SINGA AMBARA RAJA
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

BAB IV
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI BULELENG

SINGA AMBARA RAJA
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

SINGA AMBARA RAJA

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS STATISTIK

BAB IV
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI BULELENG

Indikator yang sering digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah yang berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Menurut Sukirno (2000) pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

Pertumbuhan ekonomi diperlihatkan dengan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan yang menggambarkan pertumbuhan produksi barang dan jasa dihasilkan oleh seluruh sektor yang berperan dalam kegiatan ekonomi. Dalam penghitungan PDRB Atas Dasar harga Konstan faktor harga pada tahun berjalan/bersangkutan telah

dikeluarkan terlebih dahulu dengan perkataan lain seluruh produksi maupun biaya antara pada tahun berjalan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun dasar yaitu tahun 2010. Dengan memakai patokan tahun dasar ini bisa dilihat perkembangan produksi yang dihasilkan suatu daerah yaitu produksi barang dan jasa dari sektor-sektor yang berperan dalam perekonomian Kabupaten Buleleng.

Gambar 4. 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng, 2012– 2018 (Persen)

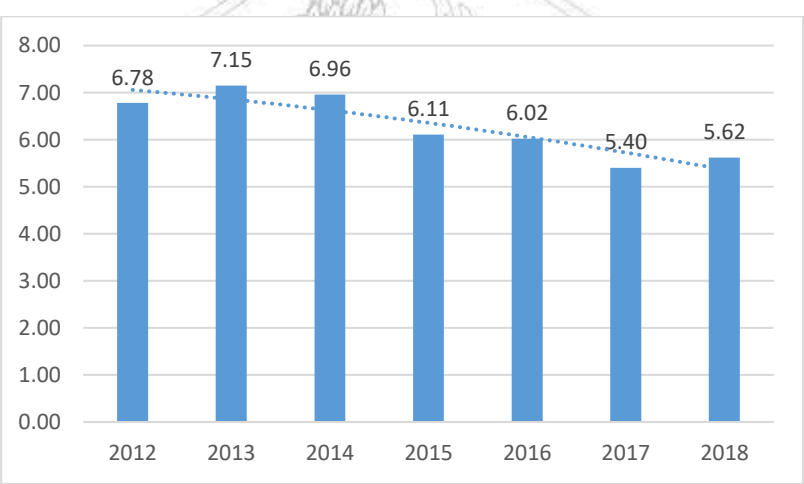

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng

Berdasarkan harga konstan 2010, Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng pada Tahun 2018 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. PDRB

Kabupaten Buleleng tahun 2018 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 22.206,96 miliar rupiah. Angka tersebut naik dari 21.025,50 miliar rupiah dari tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2018 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,62 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,39 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 8,63 persen. Dari 17 kategori lapangan usaha, terdapat 5 (lima) kategori yang tumbuh positif diatas 7 persen, 11 (sebelas) kategori tumbuh dibawah 7 persen, dan 1 (satu) kategori yang tumbuh negatif. Kategori yang tumbuh negatif pada tahun 2018 yaitu kategori Pertambangan dan Penggalian dengan pertumbuhan -5,58 persen.

Lima lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar tujuh hingga sepuluh persen adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 8,63 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 7,75 persen, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,50 persen, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,42 persen, dan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 7,28 persen.

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

Dalam kurun waktu 2014-2018, rata-rata pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori Jasa Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu tercatat tumbuh sebesar 8,63 persen. Sedangkan pertumbuhan kategori Jasa Pendidikan menunjukkan perlambatan di tahun 2018, dimana kategori Jasa Pendidikan tumbuh sebesar 6,00 persen. Mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 8,83 persen. Bahkan pada tahun 2016 kategori ini sempat mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu 11,06 persen.

Sebagai penyangga ekonomi terbesar di Kabupaten Buleleng, kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mampu tumbuh sebesar 3,49 persen. Laju pertumbuhan kategori ini sedikit meningkat dibanding tahun 2017 yang mencapai 3,06 persen. Bila dilihat secara rata-rata selama 5 (lima) tahun terakhir, kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan hanya tercatat tumbuh sebesar 3,49 persen.

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

Tabel 4. 1. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Buleleng Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha,2017–2018 (Persen)

Lapangan Usaha	*2017*)*	*2018**)*
(1)	*(2)*	*(3)*
1.Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,06	3,49
2.Pertambangan dan Penggalian	-6,07	-5,58
3.Industri Pengolahan	2,99	5,32
4.Pengadaan Listrik dan Gas	3,96	7,42
5.Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,29	2,67
6.Konstruksi	5,41	7,75
7.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,03	8,63
8.Transportasi dan Pergudangan	3,35	6,29
9.Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,65	7,50
10.Informasi dan Komunikasi	8,88	7,28
11.Jasa Keuangan dan Asuransi	2,84	2,00
12.Real Estat	5,39	4,01
13.Jasa Perusahaan	6,17	5,83
14.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2,84	3,02
15.Jasa Pendidikan	8,83	6,00
16.Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,63	5,39
17.Jasa lainnya	7,73	4,33
Produk Domestik Regional Bruto	**5,40**	**5,62**

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng

Catatan : *) angka sementara
**) angka sangat sementara

Pada tahun 2017, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng mencapai 5,39 persen dan pada tahun ini laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan hingga mencapai 5,62 persen. Demikian halnya dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali yang juga mengalami peningkatan yang mencapai 6,35 persen dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 5,57 persen.

Gambar 4. 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali, 2013– 2018 (Persen)

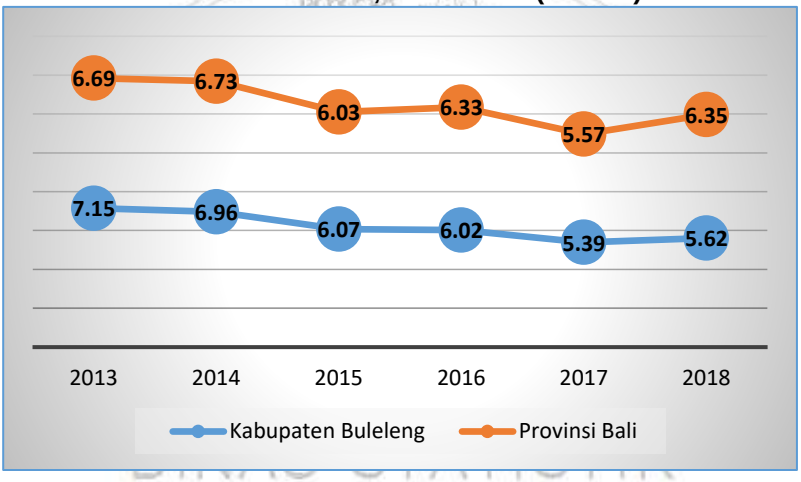

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng pada tahun 2018 didorong oleh kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi sebesar 8,63 persen. Kemudian diikuti oleh konstruksi sebesar 7,75 persen, pengadaan listrik dan gas sebesar 7,42 persen, transportasi dan pergudangan sebesar

6,29 persen, industri pengolahan sebesar 5,32 persen, pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 3,49 persen serta sektor jaminan sosial wajib mengalami peningkatan sebesar 3,02 persen.

Beberapa lapangan usaha lainnya mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2018, yaitu kategori jasa keuangan 2,00 persen, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 2,67 persen, real estate 4,01 persen, jasa lainnya 4,33 persen jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 5,39 persen, jasa perusahaan 5,83 persen, jasa pendidikan 6,00 persen, informasi dan akomodasi 7,28 persen, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 7,50 persen.

SINGA AMBARA RAJA
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

SINGA AMBARA RAJA

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS STATISTIK

BAB V
STRUKTUR EKONOMI KABUPATEN BULELENG

SINGA AMBARA RAJA
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

SINGA AMBARA RAJA

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS STATISTIK

BAB V
STRUKTUR EKONOMI KABUPATEN BULELENG

Struktur ekonomi suatu wilayah merupakan komposisi peranan masing-masing sektor menurut lapangan usaha dalam perekonomian. Struktur ekonomi digunakan untuk mengetahui sejauh mana peranan masing-masing kategori dalam mengambil peranan kue pembangunan ekonomi di suatu wilayah sehingga dapat diketahui potensi dari wilayah tersebut. Salah satu indikator yang sering dipakai untuk mengamati struktur perekonomian suatu daerah/wilayah adalah distribusi persentase dari nilai tambah bruto menurut kategori.

Perkembangan indikator struktur ekonomi secara sederhana dapat dilihat melalui tiga pengelompokan sektor yaitu sektor primer, sekunder, dan tersier. Kelompok sektor primer merupakan gabungan dari kategori pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan dan kategori pertambangan dan penggalian. Sektor sekunder merupakan gabungan dari kategori industri pengolahan/manufaktur, kategori listrik, gas dan air dan konstruksi. Sedangkan sektor tersier merupakan gabungan dari kategori perdagangan, penyedia akomodasi dan penyediaan makan minum,

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

angkutan, infokom, keuangan, keuangan, *real estate* dan jasa perusahaan serta kategori jasa-jasa lainnya.

Dari **GAMBAR 5.1** dapat diketahui bahwa peranan sektor tersier masih mendominasi di Kabupaten Buleleng dengan total capaian *share* pada tahun 2018 sebesar 62,70 persen. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 62,44 persen.

Gambar 5. 1. Kontribusi Sektor Primer, Sekunder, Tersier dalam PDRB Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2018 (Persen)

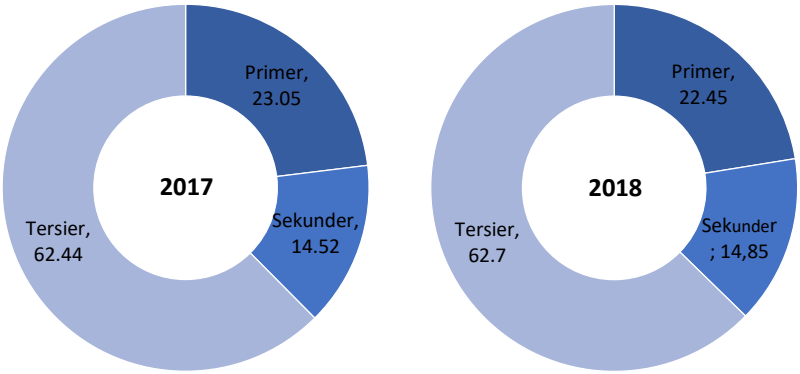

sumber: BPS Kabupaten Buleleng

Apabila kita melihat lebih rinci menurut lapangan usaha pembentuk PDRB, Kabupaten Buleleng memiliki karakteristik tidak jauh berbeda dengan kabupaten lainnya di Provinsi Bali. Pada tahun 2018, kategori pertanian masih mendominasi

perekonomian di Kabupaten Buleleng dengan *share* sebesar 21,43 persen. Sementara di posisi kedua, pariwisata yang diwakili oleh lapangan usaha akomodasi dan penyediaan makan minum memberikan konstribusi sebesar 18,64 persen. Lapangan usaha lain yang juga memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian Buleleng adalah perdagangan besar dan eceran. Pada tahun 2017 kontribusi perdagangan besar dan eceran di Kabupaten Buleleng sebesar 11,38 persen. Kemudian lapangan usaha konstruksi dan jasa pendidikan menduduki posisi keempat dan kelima dengan kontribusi masing-masing sebesar 8,61 persen dan 7,38 persen.

Gambar 5. 2. Lima Kontributor Terbesar
PDRB Kabupaten Buleleng Tahun 2018 (Persen)

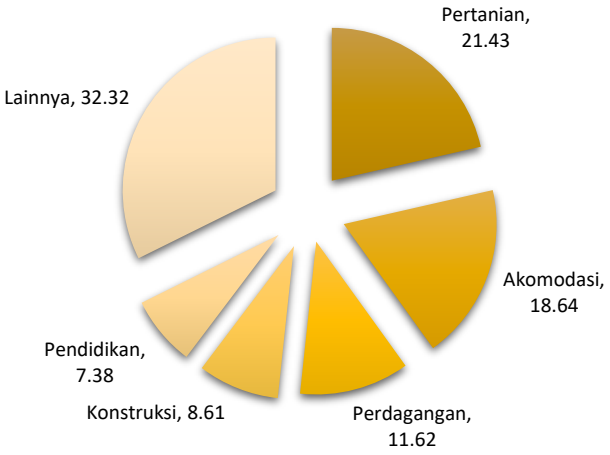

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng

Tidak bisa dipungkiri kategori pertanian masih mendominasi perekonomian di Kabupaten Buleleng. Lapangan usaha pertanian memiliki kontribusi yang cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2018 lapangan usaha pertanian mengalami penurunan *share* terhadap perekonomian Kabupaten Buleleng dengan total *share* sebesar 21,43 persen, sedangkan pada tahun 2017 kontribusinya sebesar 21,95 persen. Kabupaten Buleleng masih mampu menjaga ketahanan pangannya menjadi pensuplai beras kedua di Provinsi Bali setelah Kabupaten Tabanan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Buleleng akan terus berupaya untuk menjaga stabilitas produksi kategori pertanian dengan selalu memantau alih fungsi lahan pertanian di kawasan Bali Utara.

Gambar 5. 3. Kontribusi Kategori Pertanian di Kabupaten Buleleng
Tahun 2014-2018 (Persen)

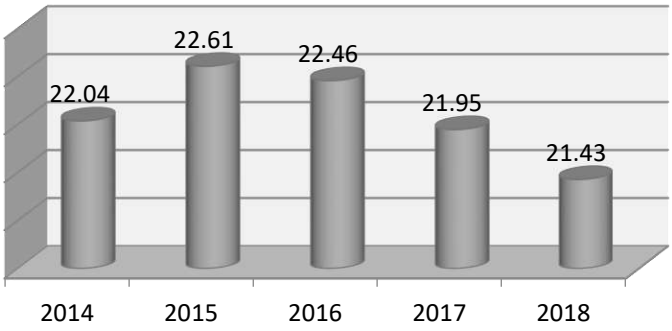

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng

Salah satu contoh sistem yang dilaksanakan dalam upaya optimasi lahan di Kabupaten Buleleng adalah dengan sistem tanam jajar legowo 2:1. Sistem ini memiliki jarak tanam yang mudah diatur sehingga populasi tanaman per hektarnya semakin tinggi. Selain itu dengan sistem tanam ini lebih memudahkan tanaman padi untuk mendapatkan sinar matahari sehingga diharapkan produktivitasnya semakin meningkat. Upaya-upaya ini perlu diteruskan mengingat tantangan terhadap wacana swasembada pangan dan ketahanan pangan terus meningkat. Mengingat potensi yang dimiliki Kabupaten Buleleng, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia (35.73 persen penduduk bekerja di sektor pertanian), maka diharapkan Kabupaten Buleleng masih bisa mewujudkan wacana tersebut.

Sementara itu, kategori yang memberikan kontribusi terbesar setelah pertanian adalah lapangan usaha akomodasi dan penyediaan makan minum. Lapangan usaha ini tidak dapat berdiri sendiri dan sangat tergantung dari kondisi eksternal. Adanya gejolak-gejolak eksternal seperti bencana alam gunung meletus sangat berdampak pada jumlah para wisatawan mancanegara yang datang ke Provinsi Bali pada umumnya dan Kabupaten Buleleng pada khususnya. Dari segi geografis pun Kabupaten Buleleng cukup jauh dibandingkan dengan objek wisata lainnya di Provinsi Bali sehingga Kabupaten Buleleng perlu memiliki daya tarik

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

tersendiri guna lebih meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Buleleng. Dengan kondisi geografis Kabupaten Buleleng yang memiliki kontur tanah yang beragam, diharapkan dapat menunjang pariwisata di Kabupaten Buleleng dengan meningkatkan potensi agrowisata sebagai salah satu daya tarik yang dapat dikembangkan di Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2018, kontribusi lapangan usaha akomodasi dan makan minum mampu mencapai 18,64 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 18,47 persen.

SINGA AMBARA RAJA
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

BAB VI

PDRB PERKAPITA EKONOMI BULELENG

SINGA AMBARA RAJA
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

SINGA AMBARA RAJA

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS STATISTIK

BAB VI
PDRB PERKAPITA EKONOMI BULELENG

PDRB per kapita atau pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Semakin besar nilai PDRB per kapita maka dapat dikatakan semakin sejahtera suatu daerah/wilayah. Kendati begitu, PDRB per kapita merupakan angka agregat, sehingga masih sangat kasar jika dijadikan cerminan bagi tingkat kesejahteraan penduduknya.

Dalam kurun waktu tahun 2015-2018, PDRB per kapita Kabupaten Buleleng menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Buleleng rata-rata mampu menciptakan PDRB (nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

SINGA AMBARA RAJA
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

Tabel 6. 1. Nilai Produk Domestik Regional Bruto 2015-2018

(Miliar rupiah)

No.	U r a i a n	Tahun			
		2015	2016	2017*	2018**
1	2	4	5	6	7
1	ADHB	25.170,26	27.690,11	30.463,41	33.098,33
2	ADHK 2010	18.818,62	19.950,72	21.025,50	22.206,96
3	Pertumbuhan PDRB (Persen)	6,07	6,02	5,39	5,62

Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS Kabupaten Buleleng

SINGA AMBARA RAJA
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

Tabel 6. 2. Nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Buleleng, 2015-2018

(Juta rupiah)

No.	U r a i a n	Tahun			
		2015	2016	2017*	2018**
1	2	4	5	6	7
1	ADHB	38,95	42,59	46,61	50,36
2	ADHK 2010	29,12	30,69	32,17	33,79
3	Pertumbuhan PDRB Per Kapita (Persen)	5,43	5,38	4,82	5,04
4	Jumlah Penduduk (000 Orang)	646,20	650,10	653,60	657,18
5	Pertumbuhan Penduduk (Persen)	0,61	0,60	0,54	0,55

Keterangan : *) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS Kabupaten Buleleng

Gambar 6. 1. Perbandingan Nilai PDRB/kapita Atas Dasar Harga Berlaku Antara Kabupaten Buleleng Dengan Provinsi Bali Tahun 2015 - 2018

(juta rupiah)

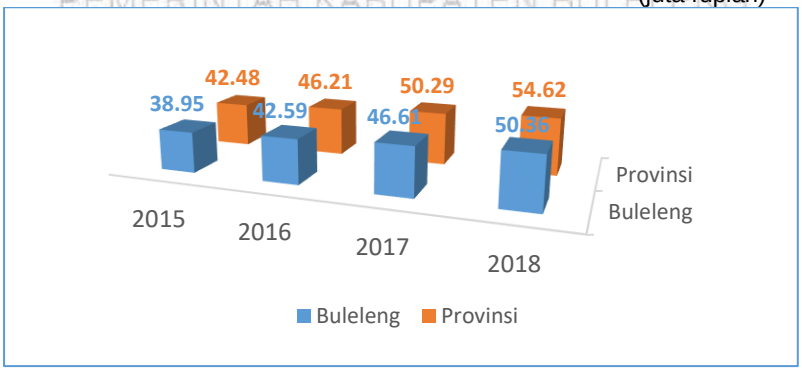

Sumber: BPS Provinsi Bali

Gambar 6. 2. Perbandingan Nilai PDRB/kapita Atas Dasar Harga Konstan Antara Kabupaten Buleleng Dengan Provinsi Bali Tahun 2015 - 2018

(juta rupiah)

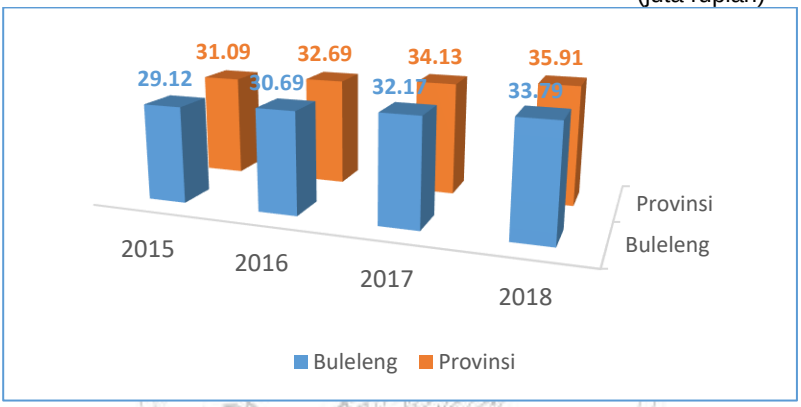

Sumber: BPS Provinsi Bali

Sementara itu, pertumbuhan per kapita secara “riil” mampu tumbuh di atas 5 persen. Bahkan pada tahun-tahun tertentu dapat mencapai 6 persen. Disisi lain, perkembangan ekonomi yang terjadi diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat secara rata-rata 0,6 persen setiap tahunnya, atau lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan per kapita.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SINGA AMBARA RAJA
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

SINGA AMBARA RAJA

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS STATISTIK

Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buleleng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (Miliar Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.926,77	5.691,74	6.219,09	6.687,85	7.093,88
B	Pertambangan dan Penggalian	312,47	309,35	346,24	334,93	336,92
C	Industri Pengolahan	1.312,05	1.532,60	1.662,62	1.791,56	1.965,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	22,00	31,10	40,19	50,90	57,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	30,32	34.14	37,33	41,61	44,27
F	Konstruksi	1.911,31	2.114,94	2.340,41	2.536,54	2.850,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.552,61	2.892,28	3.098,68	3.465,57	3.844,87
H	Transportasi dan Pergudangan	299,77	317,87	339,33	358,72	389,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.976,74	4.433,39	4.952,36	5.625,86	6.168,79
J	Informasi dan Komunikasi	1.256,21	1.317,43	1.467,69	1.621,45	1.777,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.033,48	1.103,48	1.199,90	1.285,57	1.351,30
L	Real Estat	1.155,82	1.229,22	1.277,88	1.373,67	1.454,22
M, N	Jasa Perusahaan	140,23	164.31	185,61	203,74	220,71
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.206,01	1.330,18	1443,40	1.633,28	1.794,28
P	Jasa Pendidikan	1.480,76	1.698,19	1.989,48	2.237,08	2.443,72
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	449,75	525,72	592,82	654,01	708,01
R,S, T,U	Jasa lainnya	388,65	444,31	497,07	561,06	597,48
Produk Domestik Regional Bruto		**22.354,96**	**25.170,26**	**27.690,11**	**30.463,41**	**33.098,33**

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng
* *Angka sementara*
** *Angka sangat sementara*

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buleleng Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (Miliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.852,90	4.408,61	4.177,19	4.304,84	4.455,26
B	Pertambangan dan Penggalian	224,96	226,10	246,73	231,75	218,82
C	Industri Pengolahan	1.045,30	1.124,58	1.163,65	1.298,47	1.262,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	24,74	25,45	27,44	28,53	30,65
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	29,02	29,51	31,11	32,76	33,63
F	Konstruksi	1.520,22	1.594,87	1.170,91	1.793,00	1.931,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.073,16	2.227,12	2.313,51	2.476,12	2.689,89
H	Transportasi dan Pergudangan	224,23	248,99	261,06	269,81	286,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.865,43	2.846,03	3.109,26	3.409,27	3.664,93
J	Informasi dan Komunikasi	1.107,80	1.217,48	1.336,33	1.454,96	1.560,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	796,66	825,82	879,88	904,91	923,01
L	Real Estat	983,40	1.013,23	1.038,06	1.094,04	1.137,87
M, N	Jasa Perusahaan	117,96	126,17	134,29	142,58	150,89
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.103,41	1.184,98	1.241,94	1.206,70	1.243,19
P	Jasa Pendidikan	1.226,31	1.337,77	1.485,73	1.616,90	1.713,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	378,01	410,22	444,46	473,94	499,47
R,S, T,U	Jasa lainnya	308,26	331,70	359,16	386,92	403,68
Produk Domestik Regional Bruto		**17.741,75**	**18.818,62**	**19.950,72**	**21.025,50**	**22.206,96**

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng
* *Angka sementara*
** *Angka sangat sementara*

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buleleng Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (Persen)

No.	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,04	22,61	22,46	21,95	21,43
B	Pertambangan dan Penggalian	1,40	1,23	1,25	1,10	1,02
C	Industri Pengolahan	5,87	6,09	6,00	5,88	5,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,12	0,15	0,17	0,17
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,14	0,14	0,13	0,14	0,13
F	Konstruksi	8,55	8,40	8,45	8,33	8,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,42	11,49	11,19	11,38	11,62
H	Transportasi dan Pergudangan	1,34	1,26	1,23	1,18	1,18
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17,79	17,61	17,88	18,47	18,64
J	Informasi dan Komunikasi	5,17	5,23	5,30	5,32	5,37
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,62	4,38	4,33	4,22	4,08
L	Real Estat	5,17	4,88	4,61	4,51	4,39
M,N	Jasa Perusahaan	0,63	0,65	0,67	0,67	0,67
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,39	5,28	5,21	5,36	5,42
P	Jasa Pendidikan	6,62	6,75	7,18	7,34	7,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,01	2,09	2,14	2,15	2,14
R,S,T, U	Jasa lainnya	1,74	1,77	1,80	1,84	1,81
Produk Domestik Regional Bruto		**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng
* *Angka sementara*
** *Angka sangat sementara*

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buleleng Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen), 2014–2018

No.	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,90	5,08	3,18	3.06	3,49
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,23	(7,70)	9,12	(6,07)	(5,58)
C	Industri Pengolahan	9,26	7,58	3,47	2,99	5,32
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,67	2,88	7,83	3,96	7,42
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,27	1,71	5,41	5,29	2,67
F	Konstruksi	1,75	4,91	6,65	5,41	7,75
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,29	7,43	3,88	7,03	8,63
H	Transportasi dan Pergudangan	9,33	1,98	4,85	3,35	6,29
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,78	5,98	9,25	9,65	7,50
J	Informasi dan Komunikasi	7,11	9,90	9,76	8,88	7,28
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,66	3,66	6,55	2,84	2,00
L	Real Estat	8,94	3,03	2,45	5,39	4,01
M,N	Jasa Perusahaan	7,63	6,96	6,44	6,17	5,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,89	7,36	4,81	(2.84)	3,02
P	Jasa Pendidikan	10,76	9,09	11,06	8,83	6,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,56	8,52	8,35	6,63	5,39
R,S,T, U	Jasa lainnya	7,84	7,61	8,28	7,73	4,33
Produk Domestik Regional Bruto		**6,96**	**6,07**	**6,02**	**5,39**	**5,62**

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng
* *Angka sementara*
** *Angka sangat sementara*

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

Lampiran 5. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buleleng Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2014-2018

No.	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	114,38	120,19	124,01	127,80	132,27
B	Pertambangan dan Penggalian	139,04	128,33	140,04	131,54	124,20
C	Industri Pengolahan	128,84	138,62	143,43	147,73	155,58
D	Pengadaan Listrik dan Gas	141,73	145,81	157,23	163,46	175,59
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	118,83	120,85	127,40	134,14	137,72
F	Konstruksi	139,21	146,04	155,75	164,19	176,91
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	132,74	142,60	148,13	158,54	172,23
H	Transportasi dan Pergudangan	130,84	133,39	139,86	144,55	153,64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	132,15	140,05	153,00	167,76	180,35
J	Informasi dan Komunikasi	135,21	148,60	163,11	177,59	190,51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	144,70	149,99	159,81	164,36	167,65
L	Real Estat	131,27	135,25	138,57	146,04	151,89
M,N	Jasa Perusahaan	125,59	134,33	142,98	151,81	160,65
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	142,73	153,28	160,65	156,09	160,81
P	Jasa Pendidikan	142,13	155,05	172,20	187,40	198,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	145,28	157,66	170,82	182,15	191,96
R,S,T,U	Jasa lainnya	127,98	137,72	149,12	160,64	167,60
Produk Domestik Regional Bruto		**130,26**	**138,17**	**146,48**	**154,37**	**163,04**

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng
* *Angka sementara*
** *Angka sangat sementara*

Lampiran 6. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buleleng Menurut Lapangan Usaha, 2014-2018

No.	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	127,87	140,59	148,88	155,36	159,22
B	Pertambangan dan Penggalian	127,56	136,82	140,33	144,52	153,97
C	Industri Pengolahan	125,52	136,28	142,88	149,49	155,72
D	Pengadaan Listrik dan Gas	88,96	122,21	146,47	178,41	186,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	104,47	115,69	120,00	127,02	131,63
F	Konstruksi	125,73	132,61	137,60	141,47	147,55
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	123,13	129,87	133,94	139,96	142,94
H	Transportasi dan Pergudangan	122,74	127,66	129,98	132,95	135,72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	148,09	155,77	159,28	165,02	168,32
J	Informasi dan Komunikasi	104,37	108,21	109,83	111,44	113,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	129,73	133,62	136,37	142,07	146,40
L	Real Estat	117,53	121,32	123,10	125,56	127,80
M,N	Jasa Perusahaan	118,88	130,23	138,21	142,90	146,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	109,30	112,25	116,22	135,35	144,33
P	Jasa Pendidikan	120,75	126,94	133,91	138,36	142,58
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	118,98	128,15	133,38	137,99	141,75
R,S,T,U	Jasa lainnya	126,08	133,95	138,40	145,01	148,01
Produk Domestik Regional Bruto		**126,00**	**133,75**	**138,79**	**144,89**	**149,04**

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng
* *Angka sementara*
** *Angka sangat sementara*

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

Lampiran 7. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Buleleng Menurut Lapangan Usaha, 2014-2018 (Persen)

No.	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,86	9,94	5,90	4,35	2,49
B	Pertambangan dan Penggalian	12,67	7,26	2,56	2,99	6,54
C	Industri Pengolahan	8,31	8,57	4,84	4,62	4,17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	28,80	37,38	19,85	21,80	4,35
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,30	10,73	3,73	5,85	3,63
F	Konstruksi	6,83	5,48	3,76	2,81	4,30
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,26	5,47	3,14	4,50	2,13
H	Transportasi dan Pergudangan	9,80	4,01	1,82	2,29	2,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17,38	5,19	2,25	3,60	2,00
J	Informasi dan Komunikasi	4,81	3,68	1,50	1,47	2,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,14	3,00	2,06	4,18	3,05
L	Real Estat	6,80	3,22	1,47	2,00	1,79
M,N	Jasa Perusahaan	8,36	9,95	6,13	3,39	2,36
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,75	2,70	3,53	16,46	6,63
P	Jasa Pendidikan	6,25	5,13	5,49	3,32	3,05
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,62	7,71	4,08	3,46	2,73
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,11	6,24	3,32	4,77	2,07
Produk Domestik Regional Bruto		**9,17**	**6,15**	**3,37**	**4,39**	**2,87**

Sumber: BPS Kabupaten Buleleng
* *Angka sementara*
** *Angka sangat sementara*

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

Lampiran 8. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha,2018 (Miliar Rupiah)

Kabupaten / Kota	2018
(1)	*(2)*
Jembrana	13.206,50
Tabanan	22.261,08
Badung	57.443,84
Gianyar	26.511,64
Klungkung	8.504,45
Bangli	6.535,54
Karangasem	15.954,46
Buleleng	33.098,33
Denpasar	51.440,63

Sumber: BPS Provinsi Bali

SINGA AMBARA RAJA
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

Lampiran 9. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha,2018 (Miliar Rupiah)

Kabupaten / Kota	2018
(1)	*(2)*
Jembrana	8.924,87
Tabanan	14.950,23
Badung	35.283,96
Gianyar	18.031,30
Klungkung	5.683,86
Bangli	4.351,56
Karangasem	10.556,49
Buleleng	22.206,96
Denpasar	34.168,10

Sumber: BPS Provinsi Bali

SINGA AMBARA RAJA
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

Lampiran 10. Laju Inflasi / Deflasi Kab. Buleleng 2016 - 2018

Kelompok	Tahun Kalender		
	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Laju Inflasi (%)	4,57	3,38	1,88
2. Inflasi Menurut Kelompok (%)			
a. Bahan Makanan	9,98	3,39	4,33
b. Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	4,08	3,15	0,77
c. Perumahan	1,83	8,44	-3,07
d. Sandang	8,47	6,53	4,42
e. Kesehatan	4,65	5,02	2,67
f. Pendidikan, Rekreasi dan Olaharaga	6,24	7,48	10,51
g. Transpor dan Komunikasi	-4,48	5,85	4,16

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng

SINGA AMBARA RAJA
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

Lampiran 11. Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng dan Propinsi Bali 1993 – 2018

Tahun	Kab. Buleleng	Prop. Bali
(1)	*(2)*	*(3)*
1993	7,38	7,50
1994	7,42	7,93
1995	7,57	8,14
1996	5,62	5,81
1997	-2,98	-4,04
1998	1,08	0,67
1999	3,54	3,05
2000	4,09	3,57
2001	4,04	3,04
2002	4,84	3,57
2004	4,98	4,62
2005	5,60	5,56
2006	5,35	5,28
2007	5,82	5,92
2008	5,84	5,97
2009	6,10	5,33
2010	5,85	5,83
2011	6,44	6,66
2012	6,78	6,96
2013	7,15	6,69
2014	6,96	6,72
2015	6,11	6,04
2016	6,02	6,32
2017	5,40	5,59
2018	5,62	6,35

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng

SINGA AMBARA RAJA
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS STATISTIK

Jl.Singaraja-Seririt Km. 6 Desa Tukadmungga
Telp/Fax. (0362) 41924
Website : www.statistik.bulelengkab.go.id, Email : statistik@bulelengkab.go.id